



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

# **RENSTRA 2021 2026**

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN  
PERSANDIAN**



JALAN ANDI MALLOMBASSANG NO. 72



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jl. Andi Mallombassarung, Sungguminasa – kode pos 92111

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN GOWA

NOMOR : 017/Diskominfo-SP/X/2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DISKOMINFO, SP KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2021 – 2026**

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN GOWA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
  - b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6123);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
  10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yg membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;(Tambahan lembaran negara RI noor 6485);
  11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
  13. Peraturan Daerah 5/2012 tentang RTRW kab Gowa rencana tata ruang wilayah kabupaten gowa tahun 2012-2032.
  14. tambahkan Peraturan daerah kabupaten gowa nomor 5 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (lembaran daerah kabupaten gowa tahun 2014 nomor 5),
  15. Peraturan daerah kabupaten gowa nomor 2 tahun 2015 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
  16. Permendagri 86/2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan.
  17. Permendagri 70/2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
  18. Permendagri 90/2019 Tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
  19. Permendagri 18/2020 Tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional.
  20. Permendagri 20/2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan aJangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 1).
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

23. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23)

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Seluruh Sub Unit kerja lingkup Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa dan stakeholder lainnya wajib memperhatikan Renstra sebagaimana yang dicantumkan pada diktum kesatu, khususnya dalam merencanakan dan menganggarkan berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- KETIGA** : Dalam mewujudkan mekanisme pelaksanaan Renstra ini, maka kegiatan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian perlu ditingkatkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gowa  
Pada Tanggal : 13 Januari 2021



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026. Penyusunan Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan. Kami menyadari di dalam menyusun Rencana Strategis ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan teknik perumusan maupun penyajiannya. Namun demikian, besar harapan kami agar Renstra ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan maupun penentuan kebijakan.

Sungguminasa, 24 September 2021



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SKEMA/GAMBAR &amp; DIAGRAM</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b> .....	<b>11</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	11
2.2. Sumber Daya .....	19
2.3. Kinerja Pelayanan .....	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	37
<b>BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	<b>39</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	39
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	40
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Propinsi.....	45
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	49
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis .....	52
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>53</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>56</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b> .....	<b>60</b>
5.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	60
<b>BABVI INDIKATOR KINERJA DISKOMINFO,SP YANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RPJMD</b> .....	<b>75</b>
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
DAFTAR PUSTAKA.....	
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Diskominfo-SP Kabupaten Gowa.....	20
Tabel 2.2	Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	21
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian 2021-2026.....	22
Tabel 2.4	Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Sampai Dengan Tahun 2021.....	22
Tabel 2.5	Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa Tahun 2019 – 2020 .....	28
Tabel 2.6	Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2019 – 2020.....	31
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa.....	33
Tabel. 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa.....	35
Tabel. 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	44
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Vrtisi, Misi dan Program Kepala Daerah dalam RPJMD 2018-2023.....	45
<i>Tabel. 3.3</i>	Permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya....	50
<i>Tabel. 3.4.</i>	Permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa berdasarkan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	52
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 – 2026.....	54
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Komunikasi ,Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa.....	57
Tabel.5.2	Sedangkan Rincian Kegiatan Untuk Tiap Program Beserta Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Untuk Kurun Waktu Lima Tahun 2021-2026 Dapat Dilihat Pada Tabel Berikut:....	62
Tabel 6.1	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026.....	76

## **DAFTAR SKEMA/GAMBAR & DIAGRAM**

Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi DISKOMINFO,SP .....	18





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11), Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian diharapkan mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan dan mendistribusikan informasi pembangunan ke seluruh wilayah. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi ke seluruh pelosok.

Perencanaan dan pengendalian pembangunan adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang terpadu diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang mantap dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya daerah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan regional dan global.

Sejalan dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan



Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka disusun Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026.

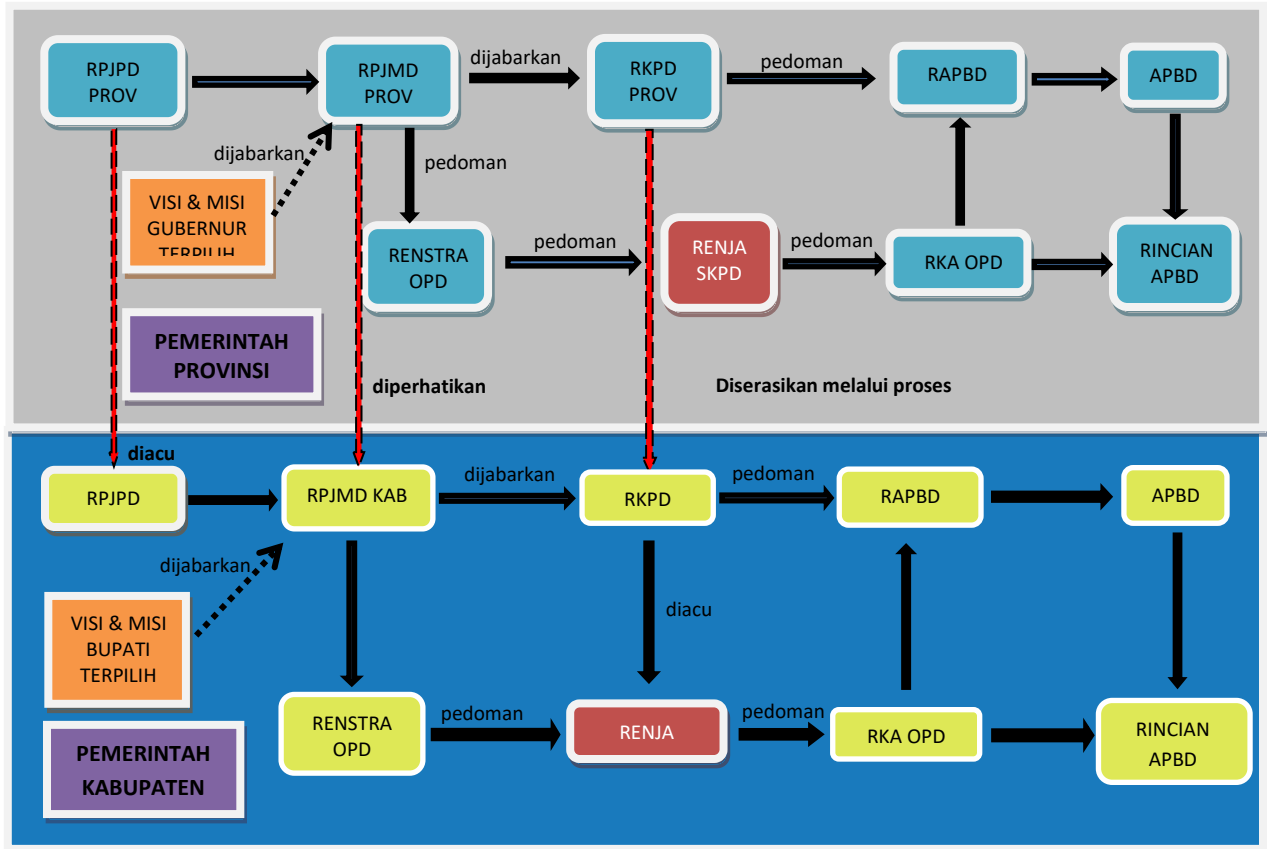
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari visi, misi Pemerintah Kabupaten Gowa dan sebagai bentuk dukungan akan pencapaian visi, misi dan program prioritas Bupati Gowa, **Dr. Adnan Purichta Ichsan, SH.MH** Wakil Bupati Gowa, **H. Abd. Rauf Malaganni, S.Sos. Msi.** yang terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Gowa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dan dilantik pada tanggal 26 Februari 2020.

Dokumen Renstra merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat setiap 5 (lima) tahun dan mutlak tersedia dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai implementasi dari amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Renstra tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan akan dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA – OPD). Untuk lebih jelasnya hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar atau skema berikut ini:



**Gambar I.1. Skema Hubungan antar Dokumen**



Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 – 2026 disusun mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa tahun 2021 – 2026. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian dalam kurun lima tahun ke depan.

Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 ini adalah tahapan akhir dari Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 dengan Visi Kabupaten Gowa yaitu “**Gowa Menjadi Andalan Sulawesi Selatan dan Seajar Daerah Termaju di Indonesia dalam Mensejahterakan Masyarakat**”. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka Renstra Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 memuat keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dan diupayakan saling bersinergi seperti RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026, RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa dengan tetap memperhatikan arahan RPJM Nasional Tahun 2019 – 2024 dan RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatik, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa tahun 2021 – 2026 berdasar pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor       );
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor       );
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas



- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
  - g. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  - h. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  - i. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  - j. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor );
  - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005 –2025;



- m. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa; peraturan daerah kabupaten gowa nomor 1 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah kabupaten gowa tahun 2021– 2026. perda 12/2012 tentang RTRW Kab Gowa Daerah 2012-2032, peraturan daerah kabupaten gowa nomor 5 tahun 2014 tentang perlindungan anak (lembaran daerah kabupaten gowa tahun 2014 nomor 5),peraturan daerah kabupaten gowa nomor 2 tahun 2015 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 adalah tersedianya dokumen kebijakan dan program sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat memenuhi target kerja sesuai dengan visi dan misi SKPD yang bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi antar pelaku pembangunan dalam hal mewujudkan cita – cita masyarakat Kabupaten Gowa sesuai dengan visi, misi, dan program dari kepala daerah terpilih. Renstra SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan kedudukannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Menggambarkan kondisi umum dinas dan capaian kinerja pelayanan;
- b. Menggambarkan permasalahan dan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi;



- c. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran dinas Periode Tahun 2021-2026 ke dalam bentuk strategi dan kebijakan
- d. Menjabarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;
- e. Merumuskan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- f. Mendukung pencapaian kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Gowa, khususnya urusan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa.
- g. Mendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan integritas dan sinergi pembangunan dari masyarakat dengan Pemerintah.
- h. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta sistem kerja yang optimal, koordinatif, dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.**

Dokumen Renstra diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, sistematika penyusunan, maksud dan tujuan.

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Renja OPD.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan



acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

### 1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, Struktur Organisasi SKPD, serta uraian Tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme)'

### 2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD





Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi. Hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada Bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih.

#### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/Kabupaten/kota.

#### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.



Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategi tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Restra SKPD tahun rencana.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**



Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.



## **BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD**

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD**

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 20.. (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 20... Nomor 23). Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.



Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 58 Tahun 2016 Tanggal 23 Desember 2016 Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa maka tugas dan fungsi dapat dijabarkan sebagai berikut :

**a. Sekertaris**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

**1. Perencanaan.**

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

**2. Umum dan Kepegawaian.**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.



### **3. Keuangan.**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

#### **b. Bidang Teknologi Informasi Dan Telekomunikasi**

Bidang Teknologi Informasi dan Telekomunikasi oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi pengelolaan Infrastruktur, Teknologi dan Telekomunikasi dan pengelolaan Layanan E-Government dan Pengembangan Aplikasi berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang teknologi informasi dan telekomunikasi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang teknologi informasi dan telekomunikasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang teknologi informasi dan telekomunikasi;
- d. pelaksanaan administrasi bidang teknologi informasi dan telekomunikasi;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Membawahi Seksi :

#### **1. Seksi Perencanaan Infrastruktur, Teknologi dan Telekomunikasi.**

Seksi Perencanaan Infrastruktur, Teknologi dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi



perencanaan Infrastruktur, Teknologi dan Telekomunikasi berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

## **2. Seksi Layanan E-Government dan Pengembangan Aplikasi**

Seksi Layanan E-Government dan Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Layanan E-Government dan Pengembangan Aplikasi berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

### **c. Bidang Komunikasi Publik**

Bidang Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang komunikasi publik berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Membawahi 3 Seksi :

#### **1. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik**

Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

#### **2. Seksi Media Luar Dan Penyuluhan Mobile**

Seksi Media Luar Dan Penyuluhan Mobile dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Media Luar Dan Penyuluhan Mobile



berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

**3. Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat.**

Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas;

**d. Bidang Statistik.**

Bidang Statistik dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas-tugas teknis operasional bidang statistik sektoral, menyelenggarakan koordinasi dan pelayanan administrasi dibidang statistik sektoral berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas;

Membawahi 2 Seksi :

**1. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyiapan teknis Pengumpulan dan Pengolahan Data berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas;

**2. Seksi Penyajian dan Publikasi**

Seksi Penyajian dan Publikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang melaksanakan penyiapan teknis operasional Seksi Penyajian dan Publikasi berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas;

**e. Bidang Persandian**

Bidang Persandian dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,





membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Membawahi 2 Seksi :

1. Seksi Tata Kelola, Pengawasan dan Evaluasi Persandian

Seksi Tata Kelola, Pengawasan dan Evaluasi Persandian dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi tata kelola, pengawasan dan Evaluasi persandian berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyusunan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Operasional Pengamanan Persandian berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

**f. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan dan membantu sebagian tugas Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang jabatan fungsional.

**2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.**

Susunan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa terdiri dari :

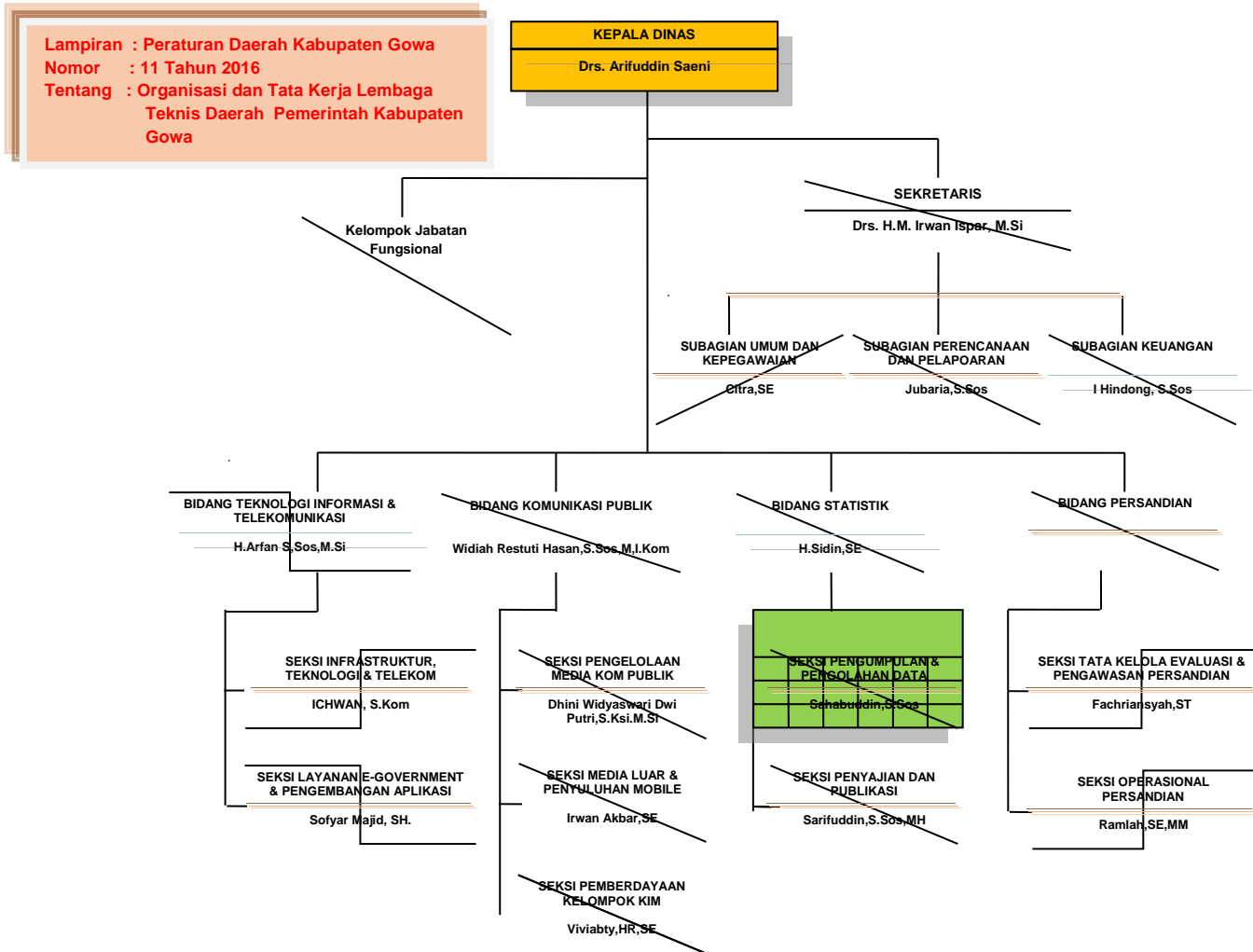
a. Kepala Dinas ( Eselon IIa)



- b. Sekretaris ( Eselon IIIa) yang membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ( Eselon Iva)
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ( Eselon Iva)
  - 3) Sub Bagian Keuangan (Eselon Iva)
- c. Bidang Teknologi Informasi & Telekomunikasi (Eselon IIIa) membawahi :
  - 1) Seksi Infrastruktur Tegnologi & Telekomunikasi (Eselon Iva)
  - 2) Seksi Layanan E-Government & Pengembangan Aplikasi (Eselon Iva)
- d. Bidang Komunikasi Publik (Eselon IIIa) yang membawahi :
  - 1) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Eselon Iva)
  - 2) Seksi Media Luar & Penyuluhan Mobile (Eselon Iva)
  - 3) Seksi Pemberdayaan Kelompok KIM (Eselon Iva)
- e. Bidang Statistik (Eselon IIIa) yang membawahi :
  - 1) Seksi Pengumpulan & Pengolahan Data (Eselon Iva)
  - 2) Seksi Penyajian & Publikasi (Eselon Iva)
- f. Bidang Persandian (Eselon IIIa) yang membawahi :
  - 1) Seksi Tata Kelola Evaluasi & Pengawasan Persandian (Eselon Iva)
  - 2) Seksi Operasional Persandian (Eselon Iva)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



**Gambar 2.1.  
Struktur Organisasi Diskominfo-SP Kabupaten Gowa Tahun 2016**





## **2.2 Sumber Daya SKPD**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas. Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Februari Tahun 2021 berjumlah 36 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa dapat dilihat pada *tabel* berikut ini:



**Tabel. 2.1**  
**Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Diskominfo-SP Kabupaten Gowa**

No.	Uraian	Eselon				Staf	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	Kepala Diskominfo-SP	-	1				1
2.	Sekretariat	-	-	1	3	3	7
3.	Bidang Teknologi Informasi & Telekomunikasi	-	-	1	2	6	9
4.	Bidang Komunikasi Publik	-	-	1	3	4	7
5.	Bidang Statistik	-	-	1	2	2	5
6.	Bidang Persandian	-	-	-	2	4	6
7.	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>1</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>36</b>

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa dengan jenjang eselon II, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain. Bidang-bidang pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian bermitra dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian melalui 4 (empat) bidang yaitu bidang Teknologi Informasi dan Telekomunikasi menjalankan peran dalam pengembangan jaringan teknologi, bidang Komunikasi Publik berperan dalam penyebarluasan informasi, bidang Statistik berperan dalam pengumpulan dan penyediaan data statistik serta bidang Persandian berperan dalam pengamanan jalur informasi persandian sedangkan Sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Kondisi kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :



**Tabel 2.2**

**Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Uraian	Eselon							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLT A	SLT P	SD	
1.	Kepala Diskominfo-SP	-	-	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	7	-	-	-	-	8
3.	Bidang Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	-	1	7	-	-	-	-	8
4.	Bidang Komunikasi Publik	-	3	4	-	1	-	-	8
5.	Bidang Statistik	-	1	4	-	-	-	-	5
6.	Bidang Persandian	-	1	4	-	1	-	-	6
7.	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Jumlah</b>		-	<b>7</b>	<b>27</b>	-	<b>2</b>	-	-	<b>36</b>
<b>(%)</b>		-	<b>19</b>	<b>75</b>	-	<b>05</b>	-	-	<b>100</b>

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel tersebut diatas, terlihat bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 27 orang (75 %). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian secara umum.

Jumlah karyawan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 7 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 19 % dari seluruh pegawai Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.

### 2.1.1 Anggaran

Dari sisi anggaran, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa mendapatkan alokasi anggaran sesuai tabel dibawah, Tabel ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2021-2026 beserta serapannya sebagai berikut :



**Tabel 2.3**

**Alokasi Anggaran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian  
2016-2021**

No.	Tahun	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	2016	5.314.735.906,-	5.255.355.081	92,91
2.	2017	1.456.167.924,-	1.444.866.643	99
3.	2018	8.987.444.624,-,-	7.722.575.771,-	86
4.	2019	2.470.027.131,-	2.341.153.930,-	97,42
5.	2020	5.314.735.906,-	5.255.355.081	92,91
6.	2021	7.414.787.757,-		

**2.1.2 Aset, Sarana dan Prasarana**

Kondisi asset dan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagaimana Tabel 2.4 dibawah ini :

**Tabel.2.4**

**Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana  
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa  
Sampai Dengan Tahun 2021**

No.	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1.	Gedung Kantor	1	Baik
2.	Kendaraan Roda Dua	1	Rusak
3.	Kendaraan Roda Empat	4	Baik
4.	GPS	1	Baik
5.	Tracker mobil operasional dinas	20	Baik
6.	FFTH Tool Kit Finer optic	1	Baik
7.	Accessories jaringan dan power video wall	1	Baik
8.	Optical fiber Identifier		Baik
9.	Mesin Ketik Manual	1	Baik
10.	Lemari Arsip pejabat	1	Baik
11.	Lemari Arsip/Besi	2	Baik
12.	Filling Besi/ Metal	9	Baik
13.	Lemari Komputer		Baik
14.	Lemari Server	5	Baik
15.	Papan Tulis		Baik
16.	White Board	1	Baik
17.	Lambang Garuda	1	Baik



18.	Kursi Besi/ Metal	3	Baik
19.	Meja Kerja Eselon II	1	Baik
20.	Meja Kerja Eselon IV	9	Baik
21.	Meja Kerja Eselon III	4	Baik
22.	Meja Kerja Staf	4	Baik
23.	Kursi Eselon II	1	Baik
24.	Kursi Eselon III	5	Baik
25.	Kursi Pimpinan	2	Baik
26.	Kursi Eselon IV	21	Baik
27.	Kursi	1	Baik
28.	Meja Rapat	2	Baik
29.	Meja Tulis	12	Baik
30.	Meja Mixer Broadcast	1	baik
32.	TV	7	Baik
33.	Kursi Rapat	15	Baik
34.	Kursi sova	2	Baik
35.	Kursi Putar	1	Baik
36.	Kursi CCTV Cotrol	1	Baik
37.	Meja Komputer		Baik
38.	Meja Kerja	28	Baik
39.	Kursi Pengunjung	7	Baik
40.	Kursi Bantal Teknisi	3	Baik
42.	Kursi Kerja	3	Baik
43.	Kursi Kerja Non struktural	5	Baik
44.	Gordyn		Baik
45.	AC	19	Baik
46.	Komputer	15	Baik
47.	Monitor	3	Baik
48.	PC Unit	13	Baik
49.	PC Cleant	3	Baik
50.	PC Rakitan	2	Baik
51.	PC video editing dan multi media	2	Baik
52.	Lenovo A10 idea center	11	Baik
53.	Dwsktop inter dual core	2	Baik
54.	Touch Screen All in one PC	1	Baik
55.	Printer	15	Baik
56.	Notebook/ Laptop	11	Baik
57.	LAN Projector	3	Baik
58.	Layar LCD Projector		Baik
59.	Switch LAN	3	Baik
60.	Pesawat Telepon/ Fax	3	Baik
61.	Alat Sidik Jari	4	Baik
62.	Patisi Ruang server	1	Baik
63.	Papan Struktur Organisasi	1	Baik
64.	Kios Sistim Informasi Touch	1	Baik





65.	Kios Sistim Informasi Layar	1	Baik
66.	Panel Box Outdoor	3	Baik
67.	Diapenser	2	Baik
68.	Bracket interktive Flat panel display	1	Baik
69.	Push Full video wall bracket	18	Baik
70.	Strukture curve for beacket video wall	1	Baik
71.	Smart UPS 10 KVA	2	Baik
72.	UPS	13	Baik
73.	Hardisk Internal	2	Baik
74.	Wireless Router	19	Baik
75.	SFP Module Single Mode 1 gb	7	Baik
76.	Router Indoor	13	Baik
77.	Router clud fiber optik	2	Baik
78.	HUB	2	Baik
79.	KVM Switch	1	Baik
80.	Switch Hub/Managaeble	18	Baik
81.	Clent Switch Poe gigabit SFP	2	Baik
82.	Video Wall Display 55 Inc	18	Baik
83.	Interaktive flat panel display 86 inci	1	Baik
84.	Sound sistim surround 5.1 ch with	1	Baik
85.	Video Processort	1	Baik
86.	Acces Point outdhoor Bullet	53	Baik
87.	Toughswitch 8 port gigabit POE	1	Baik
89.	Peralatan Jaringan Touch Screen	1	Baik
90.	Radio wirelessAcces Frekwensi 2,4 GHz	8	Baik
91.	Kabel UTP	6 Rol	Baik
92.	Koneksi Rj-45	3	Baik
93.	POE Injektor 8 Port	1	Baik
94.	Bateray VRLA DEEP cikle	4	Baik
95.	Sub Rak Modul Inverter dan Bateray	3	Baik
96.	Batteray Pack for UPS	2	Baik
97.	Konektor Rj-45	4	Baik
98.	Perlatan Jaringan Komputer	1	Baik
99.	Surge Arrestor	3	Baik
100.	Replaceable Surge Arrest	25	Baik
101.	Adaptor 24 V	10	Baik
102.	Video Coverence Full 1080p 20 site	1	Baik
103.	HDMI extender transmitter	14	Baik



104.	Cable HDMI	32	Baik
105.	IPAD wifi 32 GB	1	Baik
106.	UTP kabel belden	1	Baik
107.	Antene Onni Frekwensi	4	Baik
109.	Antene Grid Wireless Frekwensi	9	Baik
110.	Antene Dish	12	Baik
111.	Antene sectoral	8	Baik
112.	Antene Air Fiber	9	Baik
113.	Base Station	9	Baik
114.	Carrier Backhaul	9	Baik
115.	Isolator Randone	9	Baik
116.	Antene Outdoor	2	Baik
117.	Kabel STP Outdoor	1	Baik
118.	Kabel UTP cat 6	3	Baik
119.	Konektor Rj45	3	Baik
120.	Kabel UTP Cat 5E	4	Baik
121.	Antene Wireless & Towwer	5	Baik
122.	Radio Warless Out Door	1	Baik
123.	Radio warless Acces Point	2	Baik
124.	Radio wireless Acces Indoor	25	Baik
125.	Peralatan Komputer Jaringan Internet	2	Baik
126.	Antene Rocket dish	3	Baik
127.	Access Point 2.4 GHz/Radio wirwlwss Acces Point 2.4 GHz	8	Baik
128.	Jaringan Fingger Print	1	Baik
129.	Coud Router Switch 8 Port Gigabait	2	Baik
130.	Router Wireless	1	Baik
131.	Base Station Dish 5GHz	4	Baik
132.	BOX Panel	8	Baik
133.	Antene Outdoor	2	Baik
134.	Antene Sektoral Titanium	2	Baik
135.	Akses Point AC Dualband 2.4	14	Baik
136.	Server	13	Baik
137.	LCD Projector	1	Baik
138.	Infocus	1	Baik
139.	Porttable Wireless(Profesional Speaker)	1	Baik
140.	Audio Pro-optimal DSP-XFM	1	Baik
141.	Wireless Mic	1	Baik
142.	Voice Insert Recording(alat Teleconference)	1	Baik
143.	Stand Mike	6	Baik
144.	Mixer Mini	1	Baik
145.	Layar Film	1	Baik



146.	Head Set	3	Baik
147.	Telefon	4	Baik
148.	Sound Speaker	1	Baik
149.	Loadspeaker	2	Baik
150.	Radio HF/FM(Handy Talkie)	6	Baik
151.	Faximile	2	Baik
152.	Boster Driver IPA	1	Baik
153.	Exter 30-100w	1	Baik
154.	Boster	1	Baik
155.	Transmitter Pemancar FM	1	Baik
156.	Alat Studio dan Komunikasi	1	Baik
157.	Mixer Radio Broadcast	1	Baik
158.	Mixert Produksi Spot	1	Baik
159.	Antene	1	Baik
160.	Antene UHF/VHF/FM	1	Baik
161.	Antene Power Devider 6 line	1	Baik
162.	Antene Arahkan	1	Baik
163.	Kabel Antene	1	Baik
164.	Antene rewako Gowa	1	Baik
165.	Trafo 3500 volk	1	Baik
166.	Antene Sierra	1	Baik
167.	Self Supporting tower	8	Baik
168.	Antene Tower plus anti petir	2	Baik
169.	Swicher/menara antene	1	Baik
170.	Stabilizer 15Kva single phase	2	Baik
171.	Teropong	1	Baik
172.	Non Senjata api (digital door lock	1	Baik
173.	IP Camera indoor dome 2MP 1080p	14	Baik
174.	NVR 16 channel CCTV	2	Baik
175.	Besi Pengaman	5	Baik
176.	Aplikasi Sistim Informasi Touch	1	Baik
178.	Aplikasi Sistim In formasi	2	Baik
179.	WebSite di setiap SKPD	1	Baik
180.	Penyusunan Master Plan IT	1	Baik
181.	Sistim Informasi Daerah (SIMPODA)	18 Kec	Baik
182.	Windows Server	1	Baik
183.	Ufgrade & Maintenance Design	2	Baik
184.	Aplikasi laucher command center	1	Baik
185.	Integrasi system aplikasi data base	1	Baik
186.	Aplikasi situs web		Baik



### **2.3 Kinerja Pelayanan SKPD**

Urusan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pelayanan komunikasi dan informasi di wilayah Kabupaten Gowa. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa berdasarkan sasaran/target periode Renstra sebelumnya dapat dilihat secara berturut-turut pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Kab. Gowa, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebelumnya di jalankan oleh 3 (Tiga) OPD yaitu :

- 1.Kantor Kominfo bergabung Bagian Humas Sekretariat Daerah Kab. Gowa ;
- 2.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Gowa;
- 3.Dinas Kominfo bergabung Bidang Statistik Dan Bidang Persandian ;

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Gowa, kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada ketiga OPD tersebut berpindah ke Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Gowa.

#### **1. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kab. Gowa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut



diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi.



Tabel 2.5

**Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Urusan  
Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

**Kabupaten Gowa Tahun 2019 - 2020**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	3	4
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>		
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>		
<b>15</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>		
1	Jumlah jaringan komunikasi	5	5
2	Rasio warnet/gameonline terhadap penduduk	3,9	0,37
3	Jumlah penyiaran radio	2	2
4	Web site milik pemerintah daerah	ada	ada
5	Jumlah Media Elektronik Milik Pemerintah	1	1
6	Jumlah Menara Telekomunikasi	270	284

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu Pemerintah Daerah.

Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu jaringan atau sebaliknya, beberapa operator dapat menggunakan hanya satu jaringan telekomunikasi di pemerintah daerah.

Jumlah jaringan telepon seluler yang ada di Kabupaten Gowa sebanyak 5 (enam) operator yaitu Telkomsel, Indosat, XL, Axiata, Smartfren, Three. Sedangkan jumlah jaringan



stasioner (Stasiun jaringan/Kantor Operator Seluler) belum ada di Kabupaten Gowa.

Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

2. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk atau ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk. Wartel atau warung telekomunikasi adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan telekomunikasi kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Warnet atau warung internet tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan. Keberadaan wartel saat ini di Kabupaten Gowa sudah menghilang digantikan dengan maraknya warnet atau game online.

Jumlah Warnet/game online di Kab. Gowa pada tahun 2020 ada 196 warnet/game online dan jumlah penduduk 765.836 jiwa sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar jiwa, sehingga Rasio Warnet terhadap penduduk pada tahun 2020 adalah 3,9 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 80 warnet dengan rasio 0,37.



Semakin menurun rasio warnet ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan akses internet bagi masyarakat.

3. Jumlah Penyiaran radio Lokal di Kabupaten Gowa sampai dengan Tahun 2020 sejumlah 2 lembaga penyiaran, yaitu :

Penyiaran Radio Lokal sejumlah 2 lembaga yaitu : Radio Rewako FM dan Gama FM, Rewako FM yang merupakan Radio Pemerintah dibawah naungan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, dan Gama Radio local di Kabupaten Gowa

Dengan adanya penyiaran radio di Daerah maka ini menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah.

4. Website milik Pemerintah Daerah ada yaitu:  
[www.gowakab.go.id](http://www.gowakab.go.id)
5. Jumlah Media Elektronik milik Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2020 terdapat 1 (satu) Radio Rewako FM
6. Jumlah Menara Telekomunikasi pada Tahun 2020 di Kabupaten Gowa terdapat 284 menara mengalami kenaikan dari tahun 2019 yang mencapai 270 menara, dikarenakan adanya penambahan penempatan menara telekomunikasi di Kabupaten Gowa.





## 2. *Urusan Statistik*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Statistik.

Perkembangan capaian kinerja pembangunan daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Statistik di Kabupaten Gowa pada Tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6

Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Urusan  
Pemerintahan Bidang Statistik

Kabupaten Gowa Tahun 2019 - 2020

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	3	4
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>		
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>		
<b>19</b>	<b>Statistik</b>		
1	Jumlah dokumen statistik Daerah yang tersedia	3	3
2	Ada/tidaknya buku statistik tentang Kabupaten Gowa	ada	ada
3	Dokumen Statistik daerah yang tersusun	1	1



Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah dokumen Statistik Daerah yang tersedia pada tahun 2020 adalah sebanyak 3 (Tiga) dokumen yaitu :
  - a. Gowa Dalam Angka Tahun 2020;
  - b. PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2020;
  - c. Buku RPJMD 2021-2026
2. Buku Statistik tentang Kabupaten Gowa, ada yaitu Buku Gowa Dalam Angka yang disusun masih (BPS) dan dipublikasi setiap tahunnya.

### **3. *Urusan Persandian***

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh perangkat daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandiaan.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi maka kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola **J**aminan Keamanan Informasi (**JKI**) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset



atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi perbulannya.

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei/2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan persandian di Kabupaten Gowa.



**Tabel. 2.7**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Gowa**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DISKOMINFO-SP	Target SP M	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-						Hasil Capaian
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	<i>Kepuasan ASN terhadap Layanan Perencanaan, keuangan dan umum kepegawaian Diskominfo</i>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	50	50	80	92,91	-	0,5	0,5	0,8	0,9		
2.	<i>Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas jaringan komunikasi</i>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	50	60	80	99,90	0	0,5%	0,6%	0,8%	0,9		



**Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Gowa**

3.	Meningkatnya kerjasama informasi yang baik dengan Mass Media			100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	45	50	60	92,54	0	0	0,45%	0,5%	0,6%		
4.	kuantitas penyebaran informasi kepada masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	100%		50	50	0	0	0	0,5	0,5	0	0		
5.	Meningkatnya kuantitas penyebaran informasi kepada masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	45	50	60	100%	0	0,45	0,5	0,6	100%		
6.	Meningkatnya koordinasi dan penyediaan data statistik bersifat sektoral			100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	50	60	90	99,56	0	0,5%	0,6%	0,9%	100%		
7.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya komunikasi dan Informasi khususnya persandian			100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	50	50	80	92,22	0	0,5%	0,5%	0,8%	100%		



**Tabel. 2.8**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Gowa**

NO	Urusan	Anggaran pada Tahun Ke...					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke...					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		(Rp.)					(Rp.)					(%)					(%)	
		1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	BTL Belanja Pegawai	0	2.334.424.280	3.549.513.546	3.746.266.749.85	3.556.615.914	0	2.334.424.280	3.549.513.546	3.746.266.74	3.556.615.914	0	100	100	100	100	100	100
2.	BL Belanja Pegawai	0	115.975.650	193.715.000	2.359.651.731	2.330.899.231	0	115.975.650	193.715.000	2.341.153.930	2.330.899.231	0	100	100	99	92,91	80	100



**Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Gowa**

---

3.	Belanja Barang dan Jasa	0	858.429.774	3.869.289.324	1.646.290.231	1.581.282.231	0	858.429.774	3.869.289.324	1.631.323.430	1.581.282.231			98	99	99	100	80	99
4.	Belanja Modal	0	97.672.500	498.343.600	594.587.500	636.360.000	0	97.672.500	498.343.600	594.117.500	636.360.000			98	50	99,92	100	60	100



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian**

Dinas komunikasi informatika, statistik dan persandian berdasarkan tupoksinya mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengembangan komunikasi yang berbasis teknologi dan pelayanan penyediaan data statistik dan pengamanan yang berhubungan dengan persandian, mempunyai tantangan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan database sehingga implementasi e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat;
2. Belum tersedianya gedung dan perlengkapan kantor yang memadai;
3. Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang berhubungan bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian;
4. Kurang tersedianya SDM dibidang pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;

Sementara itu di sisi lain, ada beberapa faktor peluang yang dapat dimanfaatkan pada lingkungan eksternal Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Gowa, antara lain:

1. Semakin tingginya pemanfaatan perangkat komunikasi oleh masyarakat membuat penyebaran informasi semakin mudah;
2. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah;
3. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur;
4. Adanya pendapatan asli daerah dari pengendalian Menara Telekomunikasi.





## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa dimaksudkan untuk mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa dalam menjalankan tugasnya (*Self Evaluation*). Untuk mengetahui permasalahan yang ada dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerja sebelumnya dan dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor – faktor yang menghambat baik yang berada didalam kewenangan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa maupun dari kewenangan yang ada di luar Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Aspek yang menjadi bahan kajian untuk melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa meliputi:

#### **a. Kesekretariatan**

- 1) Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi, seperti : Akuntan, Arsiparis dan bersertifikat pengadaan barang.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan dan tupoksi dinas komunikasi informatika, statistik dan persandian.

#### **b. Bidang E- Government**

- 1) Rendahnya kualitas SDM dibidang Teknologi Informasi Komunikasi;
- 2) Kurangnya SDM dibidang Teknologi Informasi Komunikasi (Ahli IT);
- 3) Kurangnya sarana dan prasana bidang Teknologi Informasi Komunikasi;
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 5) Kurangnya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan *e-government*.
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan *e-government*.
- 7) Belum optimalnya pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi.

#### **c. Bidang Statistik dan Persandian**

1. Kurangnya SDM dibidang Statistik;



2. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang Statistik dan Persandian;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Sistem Informasi dan komunikasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal.
5. Belum berjalannya fungsi Kelompok Informasi Masyarakat yang telah terbentuk secara optimal.
6. Terbatasnya data penunjang guna penyusunan statistik sektoral
7. Belum adanya regulasi terkait dengan penyelenggaraan website pemerintah kabupaten Gowa

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah tersebut. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Gowa Tahun 2021–2026 adalah

***“Terwujudnya Masyarakat yang Unggul Dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbaik”.***

Visi di atas memiliki Tiga pokok visi, yaitu:

1. ***Masyarakat yang Unggul*** dimaknakan sebagai kondisi masyarakat dengan kualitas hidup lebih cerdas, sehat, produktif, religius, berkarakter gotong royong, inklusif dan partisipatif.
2. ***Masyarakat yang Tangguh*** dimaknakan sebagai kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi hidup yang berkualitas.
3. ***Tata kelola pemerintahan Terbaik*** dimaknakan sebagai kondisi pemerintahan yang



bersih dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka diimplementasikan dalam sejumlah misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
- b. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
- c. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
- d. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Misi di atas memiliki makna, yaitu:

**Misi 1** “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.”

merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan : pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta kualitas sumber daya manusia yang religius dan berbudaya.

**Misi 2** “Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

**Misi 3** “Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.” Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

**Misi 4** “Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas yang diwujudkan melalui upaya perbaikan layanan publik secara terpadu dan terintegrasi dan peningkatan kualitas



birokrasi.

*Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mendukung pencapaian misi ke-4 yaitu “Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.”* . Hasil Identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan *Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian* yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan . Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



**Tabel. 3.1**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : <b>Terwujudnya Masyarakat yang Unggul Dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbaik.</b>				
No	Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
<b>Misi 4</b>	<b>Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.</b>			
1	Program Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung bagi penyebaran jaringan informasi kepada masyarakat, keterbatasan pengelola informasi dan dokumentasi publik</li> <li>Penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah belum optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wilayah Kabupaten Gowa yang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah.</li> <li>Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.</li> <li>Keterbukaan informasi belum menjadi skala prioritas pada badan public/OPD</li> <li>Desiminasi dan layanan informasi public yg dilaksanakan belum sesuai dengan strategi komunikasi/SOP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Akses jalan menuju seluruh wilayah kabupaten sudah dalam kondisi baik.</li> <li>Akses jaringan BTS untuk internet sudah menjangkau daerah pelosok.</li> </ol>
2	Program pengembangan dan implementasi e-government	Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penerapan e-government dengan berbasis elektronik dan aplikasi website.	Keterbatasan anggaran dan SDM untuk peningkatan pelayanan yang berbasis elektronik dan aplikasi website.	Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis berbasis elektronik dan aplikasi website.
3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan layanan persandian dan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya optimal</li> <li>Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi</li> <li>Belum terhubungnya jaringan komunikasi sandi (JKS),Alat pendukung utama (APU) dari badan siber dan sandi negara (BSSN) masih bertahap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum terhubung jaringan komunikasi sandi (JKS) pd semua perangkat daerah (OPD),Palsan alat HT tdk bias digunakan,karena belum adanya jaringan refiter</li> <li>Kurangnya tenaga IT di bidang pengamanan informasi</li> <li>Belum adanya alat pendukung utama (APU)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peralatan sandi (Palsan) sudah ada tapi pemasangan refiter belum ada.</li> <li>Mengrekrut tenaga IT baru untuk mewujudkan capaian Pengamanan Informasi yang maksimal.</li> </ol>
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan data/wali dan produsen data belum menentukan standart data dan format meta data yg akan dibekukan.</li> <li>Database masih kurang lengkap dan bersifat parsial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya perhatian dalam penyajian data pada Bidang statistic</li> <li>Keterbatasan anggaran dan SDM untuk pengembangan Data dan informasi/Statistik</li> <li>Kurangnya tenaga terampil dalam pengelola data</li> <li>Kurangnya Sumber daya aparatur yg</li> </ol>	Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.



			memiliki kompetensi dan kapasitas khususnya dibidang statistik	
--	--	--	--	--

### **3.3 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan**

#### **3.3.1 Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi**

Kelembagaan Diskominfo yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Dinas Kominfo-SP, untuk capaian kinerja yang optimal dipandang perlu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kesamaan pemahaman dan interpretasi terhadap berbagai produk peraturan perundang- undangan bidang komunikasi dan informatika khususnya terkait dengan penyelenggaraan urusan daerah dibutuhkan untuk mempercepat terwujudnya pembangunan bidang komunikasi dan informatika di daerah.
2. Tersedianya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan kapasitas khususnya di bidang komunikasi
3. Rendahnya anggaran yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan urusan komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

Hasil Telaahan terhadap Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam pencapaian indikator kinerja yang tertuang dalam sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.



### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Perencanaan pembangunan akan berdampak pada pemanfaatan ruang, sehingga perlu penelaahan terhadap arahan RTRW Kabupaten Gowa. Penataan ruang wilayah Kabupaten Gowa bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Gowa yang terkemuka, aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berdaya saing dan maju di bidang pertanian, industri, jasa, perdagangan, dan wisata melalui inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan mendukung fungsi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Mamminasata.

Strategi pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*) dilakukan melalui upaya pelestarian lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk konsistensi keberadaan kawasan lindung untuk tetap dipertahankan, rehabilitasi kawasan kritis, pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam, serta pengelolaan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukungnya (*carring capacity*). Strategi pengembangan di atas, dilakukan dengan mempertimbangkan segenap unsur-unsur potensi dan permasalahan serta arah kebijaksanaan pembangunan daerah dengan tetap berprinsip pada pembangunan yang berwawasan lingkungan demi terciptanya kesinambungan pembangunan yang optimal.

Secara umum berdasarkan fungsi utamanya, pola ruang wilayah Kabupaten Gowa terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung didefinisikan sebagai kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Sedangkan kawasan budi daya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Pengembangan kawasan budi daya di wilayah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan



dengan memperhatikan sumberdaya manusia untuk menyetarakan pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Rencana pemanfaatan pola ruang kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan.

**Tabel. 3.3**

**Permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Sistem jaringan telekomunikasi antara wilayah dataran tinggi dan dataran rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keberadaan infrastruktur Jaringan akses informasi yang masih terbatas pada jaringan antar SKPD dan kecamatan yang mengindikasikan lemahnya informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.</li> <li>Kesenjangan antar masyarakat yang dapat mengakses dunia digital/internet.</li> </ul>	Pembangunan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi yang belum optimal yang disebabkan oleh tingkat kepedulian SDM terhadap perkembangan teknologi informasi yang masih rendah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepercayaan pemangku kebijakan terhadap eksistensi Diskominfo-SP sebagai penyelenggara urusan komunikasi dan informatika di wilayah Kabupaten Gowa</li> <li>Peraturan Perundang – Undangan bidang Komunikasi dan Informatika yang mendukung Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan Informasi.</li> </ul>





Peran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian terhadap KLHS adalah bagaimana memperhatikan dan mengakomodir rekomendasi yang telah dituangkan sebagai hasil kajian. Dari hasil kajian yang tertuang dalam KLHS, maka terdapat masalah yang perlu mendapat perhatian yaitu infrastruktur Jaringan akses informasi yang masih terbatas pada jaringan antar SKPD dan kecamatan. Permasalahan tersebut akan diminimalisir lewat program pengembangan akses jaringan yang selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan kegiatan pengembangan data dan informasi spasial sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS ini selanjutnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan KLHS RPJMD berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) termuat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Gowa. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS, yakni penguatan pelaksanaan dan pengawasan program- program ramah lingkungan yang telah direncanakan, salah satunya pengawasan pemanfaatan ruang terkait pengembangan infrastruktur telekomunikasi.



**Tabel. 3.4.**  
**Permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa berdasarkan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Bappeda	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<i>Data dan Informasi</i>	<i>Data dan informasi khususnya yang terkait dengan data dan informasi spasial belum berjalan dengan baik</i>	<i>Keterbatasan Anggaran</i>	<i>Dukungan teknologi dan Kecenderungan pengembangan spasial</i>

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan, dan kelemahan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian maka dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

1. Penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa (SPBE) ;
2. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE ;
3. Belum Optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya *Smart City* ;
4. Pembangunan opini public di masyarakat yang majemuk dengan kondisi dan tantangan yang bervariasi dan Menangkal disinformasi.
5. Belum Optimalnya sistem integrasi data statistik sektoral daerah.
6. Belum adanya penerapan dan implementasi sistem manajemen keamanan informasi di Pemerintahan Kabupaten Gowa



## **BAB IV TUJUAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.**

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika, statistik dan Persandian harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gowa.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. **Tujuan** yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 adalah : **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT”**

**Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin



diwujudkan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 adalah

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan pengelolaan informasi daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan data sectoral
3. Meningkatnya penggunaan sistim informasi persandian

Untuk mengetahui lebih jelas tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Dinas Komunikasi dan  
Informatika tahun 2021 - 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis It		Indeks Sistim Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)
1		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan pengelolaan informasi daerah.	Nilai keterbukaan Informasi Publik	80,1 (menuju Informatif)	90,1 (Informatif)	90,1 (Informatif)	90,1 (Informatif)	90,1 (Informatif)
2		Meningkatnya kualitas pelayanan data sectoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Level 1	Level 1	Level 1	Level 1	Level 1



3		Meningkatnya Keamanan Data Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	30 (Baik)	50 (Cukup)	50 (Cukup)	50 (Cukup)	50 (Cukup)
---	--	--	----------------------------------	-----------	------------	------------	------------	------------

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa telah sejalan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke 4 yaitu **“Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.”** Sasaran 1 yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”** dengan **Indeks Pelayanan Publik** sebagai Indikator Sasaran.



## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Hal tersebut diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Gowa dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah, pada ketentuan umum pasal 1, disebutkan bahwa :

- Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
- Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau



kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Gowa merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Tabel 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Gowa**

<b>VISI</b> : TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK			
<b>MISI 4</b> : Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN Strategi</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Dan Komunikasi Yang Transparan Dan Akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan pengelolaan informasi daerah	Meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika	Peningkatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemda
			Peningkatan Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemda



			Peningkatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City
			Peningkatan Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan
			Peningkatan Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemda
			Peningkatan Layanan Infra Struktur Dasar data Center, Disaster Recovery Center dan TIK
			Peningkatan Penyelenggaraan Government Chief Information Office (GCIO)
		Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Peningkatan pemantauan opini dan aspirasi masyarakat melalui media massa
			Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Media
			Peningkatan Produksi Konten Informasi Publik





<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
			Peningkatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat
			Peningkatan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dalam rangka Keterbukaan informasi Publik
<b>Terwujudnya Tata Kelola Statistik Sektoral Kabupaten Yang Sistematis, Berkualitas Dan Integratif</b>	Meningkatnya kualitas pelayanan data sektoral	Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Desiminasi data Statistik Daerah
<b>Keamanan Data Dan informasi Pemerintah Daerah</b>	Meningkatnya Keamanan Data Informasi Pemerintah Daerah	Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Peningkatan Pengembangan Layanan Keamanan Informasi



## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.**

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang akan dan harus dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota, kegiatannya :
  - 1).Perencanaan, Penganggaran, dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2).Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah
  - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program informasi dan komunikasi public, dengan kegiatan :
  - 1). Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 3 Program aplikasi informatika, dengan kegiatan :
  - 1) Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten.
  - 2) Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten.



4. Program penyelenggaraan statistik sektoral, dengan kegiatan :
  - 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
5. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, dengan kegiatan :
  - 1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
  - 2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel.5.2

Sedangkan Rincian Kegiatan Untuk Tiap Program Beserta Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Untuk Kurun Waktu

Lima Tahun 2021-2026 Dapat Dilihat Pada Tabel Berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan,Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika																

Meningkatkan kapasitas aparatur perencana dan pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Organisasi yang profesional	Persentase peningkatan kapasitas aparatur perencana dan pelayanan administrasi perkantoran	2.16.01.08.02	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan penunjang urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	Rp 57.186.789	100%	Rp 60.186.789	100%	Rp 62.186.789	100%	Rp 63.186.789	100%	Rp 64.186.789	100%	Rp 65.186.789	Kasi Perencanaan	Kab. Gowa
			2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	100%	Rp 57.186.789	100%	Rp 60.186.789	100%	Rp 62.186.789	100%	Rp 63.186.789	100%	Rp 64.186.789	100%	Rp 65.186.789	Kasi Perencanaan	Kab. Gowa
			2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	1 Dok	Rp 15.421.000	1 Dok	Rp 16.421.000	1 Dok	Rp 17.421.000	1 Dok	Rp 17.421.000	1 Dok	Rp 17.421.000	1 Dok	Rp 84.105.000	Kasi Perencanaan	Kab. Gowa
			2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	2 Dok	Rp 25.500.000	2 Dok	Rp 26.500.000	2 Dok	Rp 26.500.000	2 Dok	Rp 27.500.000	2 Dok	Rp 28.500.000	2 Dok	Rp 28.500.000	Kasi Perencanaan	Kab. Gowa

			2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	1 lap	Rp 16.265.789	1 lap	Rp 17.265.789	1 lap	Rp 18.265.789	1 lap	Rp 18.265.789	1 lap	Rp 18.265.789	1 lap	Rp 18.265.789	Kasi Perencanaan	Kab. Gowa
Meningkatkan kapasitas aparatur perencana dan pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Organisasi yang profesional	Persentase peningkatan kapasitas aparatur perencana dan pelayanan administrasi perkantoran	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan penunjang urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	Rp 3.289.788.038	100%	Rp3.292.788.038	100%	Rp 3.295.035.038	100%	Rp 3.296.695.038	100%	Rp 3.299.195.038	100%	3.302.695.038	Kasi Keuangan	Kab. Gowa

			2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan kegiatan administrasi keuangan yang dilaksanakan	100%	100%	Rp 3.289.788.038	100%	Rp3.292.788.038	100%	Rp 3.295.035.038	Rp 4	Rp 3.296.695.038	Rp 4	Rp 3.299.195.038	Rp 4	Rp 3.302.695.038	Kasi Keuangan	Kab. Gowa
			2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	37 Orang/bln	Rp 3.208.787.038	37 Orang/bln	Rp 3.208.787.038	37 Orang/bln	Rp 3.208.787.038	37 Orang/bln	Rp 3.208.787.038	37 Orang/bln	Rp 3.208.787.038	37 Orang/bln	Rp 3.208.787.038	Kasi Keuangan	Kab. Gowa
			2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	12 dok	Rp 68.908.000	12 dok	Rp 69.908.000	12 dok	Rp 70.908.000	12 dok	Rp 71.908.000	12 dok	Rp 72.908.000	12 dok	Rp 75.908.000	Kasi Keuangan	Kab. Gowa

			2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	9 lap	Rp 6.340.000	9 lap	Rp 7.340.000	9 lap	Rp 8.340.000	9 lap	Rp 8.500.000	9 lap	Rp 9.500.000	9 lap	Rp 9.500.000	Kasi Keuangan	Kab. Gowa
			2.16.01.2.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis Prognosis realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	4 dok	Rp 5.753.000	4 dok	Rp 6.753.000	4 dok	Rp 7.000.000	4 dok	Rp 7.500.000	4 dok	Rp 8.000.000	4 dok	Rp 8.500.000	Kasi Keuangan	Kab. Gowa
Meningkatkan kapasitas aparatur perencana dan pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Organisasi yang profesional	Persentase peningkatan kapasitas aparatur perencana dan pelayanan administrasi perkantoran	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan penunjang urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	Rp 690.943.767	100%	Rp 791.943.767	100%	Rp 793.942.787	100%	Rp 838.238.787	Rp 4	Rp 839.238.787	100%	Rp 839.724.372	Kasubag Kepegawaian	Kab. Gowa



			2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah operasional administrasi Umum	100%	100%	Rp 690.943.767	100%	Rp 791.943.767	100%	Rp 793.942.787	100%	Rp 838.238.787	Rp 4	Rp 839.238.787	100%	Rp 839.724.372	Kasubag Kepegawaian	Kab . Gowa
			2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	3 jaringan	Rp 1.293.980	3 jaringan	Rp 1.293.980	3 jaringan	Rp 2.293.000	3 jaringan	Rp 3.000.000	3 jaringan	Rp 3.000.000	3 jaringan	Rp 3.000.000	Kasubag Kepegawaian	Kab . Gowa
			2.16.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	10 paket	Rp 1.724.372	10 paket	Rp 1.724.372	10 paket	Rp 1.724.372	10 paket	Rp 1.724.372	10 paket	Rp 1.724.372	10 paket	Rp 1.724.372	Kasubag Kepegawaian	Kab . Gowa
			2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	37 paket	Rp 30.514.415	37 paket	Rp 31.514.415	37 paket	Rp 32.514.415	37 paket	Rp 33.514.415	37 paket	Rp 34.514.415	37 paket	Rp 35.000.000	Kasubag Kepegawaian	Kab . Gowa

			2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	3 laporan	Rp 657.411.000	3 laporan	Rp 757.411.000	3 laporan	Rp 757.411.000	3 laporan	Rp 800.000.000	3 laporan	Rp 800.000.000	3 laporan	Rp 800.000.000	Kasubag Kepegawaian	Kab . Gowa
			2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrai Kepegawaian	100%	100%	Rp 39.750.000	100%	Rp 40.000.000	100%	Rp 50.000.000	100%	Rp 50.000.000	100%	Rp 50.000.000	100%	Rp 50.000.000	Kasubag Kepegawaian	Kab . Gowa
			2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	2 paket	Rp 39.750.000	2 paket	Rp 40.000.000	2 paket	Rp 50.000.000	2 paket	Rp 50.000.000	2 paket	Rp 50.000.000	2 paket	Rp 50.000.000	Kasubag Kepegawaian	Kab . Gowa
			2.16.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan jasa Komunikasi Telepon, listrik dan Sumber daya air kantor	100%	100%	Rp 55.307.934	100%	Rp 55.307.934	100%	Rp 55.307.934	100%	Rp 55.307.934	100%	Rp 55.307.934	100%	Rp 55.307.934	Kasubag Kepegawaian	Kab . Gowa

			2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 paket	100%	Rp 55.307.934	100%	Rp 55.307.934	100%	Rp 55.307.934	100%	Rp 55.307.934	100%	Rp 55.307.934	100%	Rp 55.307.934	Kasubag Kepegawaian	Kab . Gowa
			2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	100%	100%	Rp 1.025.759.725	100%	Rp 1.029.759.725	100%	Rp 1.035.759.725	100%	Rp 1.037.759.725	100%	Rp 1.039.759.725	100%	Rp 1.043.759.725	Kasubag Kepegawaian	Kab . Gowa
			2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	4 unit	Rp 117.021.200	4 unit	Rp 120.021.200	4 unit	Rp 125.021.200	4 unit	Rp 126.021.200	4 unit	Rp 127.021.200	4 unit	Rp 130.021.200	Kasubag Kepegawaian	Kab . Gowa

			2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	39 unit	Rp 42.110.000	39 unit	Rp 43.110.000	39 unit	Rp 44.110.000	39 unit	Rp 45.110.000	39 unit	Rp 46.110.000	39 unit	Rp 47.110.000	Kasubag Kepegawaian	Kab . Gowa
			2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	1 unit	Rp 19.950.000	1 unit	Rp 19.950.000	1 unit	Rp 19.950.000	1 unit	Rp 19.950.000	1 unit	Rp 19.950.000	1 unit	Rp 19.950.000	Kasubag Kepegawaian	Kab . Gowa
			2.16.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	100%	100%	Rp. 846.678.525,-	100%	Rp. 846.678.525,-	100%	Rp. 846.678.525,-	100%	Rp. 846.678.525,-	100%	Rp. 846.678.525,-	100%	Rp. 846.678.525,-	Kasubag Kepegawaian	Kab.Gowa
			2.16.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	100%	3 unit	Rp 153.382.000	3 unit	Rp 153.382.000	3 unit	Rp 153.382.000	3 unit	Rp 153.382.000	3 unit	Rp 153.382.000	3 unit	Rp 153.382.000	Kasubag Kepegawaian	Kab . Gowa

			2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	10 unit	Rp 693.296.525	10 unit	Rp 693.296.525	10 unit	Rp 693.296.525	10 unit	Rp 693.296.525	10 unit	Rp 693.296.525	10 unit	Rp 693.296.525	Kasubag Kepegawaian	Kab . Gowa
Meningkatkan kerjasama yang baik dengan mass Media	Terwujudnya peningkatan kuantitas pelayanan publik	Persentase Penyebarluasan informasi Program pemerintah kepada masyarakat tercapai dengan maksimal	2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Rp 5.156.133.500	100%	Rp 5.156.133.500	100%	Rp 5.156.133.500	100%	Rp 5.156.133.500	100%	Rp 5.156.133.500	100%	Rp 5.156.133.500	Bidang Komunikasi Publik	Kab. Gowa
			2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah yg menyebarkan informasi dan	100%	100%	Rp 2.580.690.500	100%	Rp 2.580.690.500	100%	Rp 2.580.690.500	100%	Rp 2.580.690.500	100%	Rp 2.580.690.500	100%	Rp 2.580.690.500	Bidang Komunikasi Publik	Kab. Gowa



			2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	100%	1 dok	Rp 5.247.500	1 dok	Rp 5.247.500	1 dok	Rp 5.247.500	1 dok	Rp 5.247.500	1 dok	Rp 5.247.500	1 dok	Rp 5.247.500	Bidang Komunikasi Publik	Kab. Gowa
<b>Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan komunikasi</b>	Terwujudnya penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan berbasis online.	<b>Persentase Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan komunikasi</b>	2.16.03	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	Rp 2.223.033.200	100%		100%		100%		100%		100%		Bidang TIK	Kab.Gowa
			2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase kegiatan, perangkat daerah dan pelayanan publik pd pemerintah daerah yg dimanfaatkan secara daring dengan	100%	100%	Rp 1.635.000.000	100%	Rp 1.635.000.000	100%	Rp 1.635.000.000	100%	Rp 1.635.000.000	100%	Rp 1.635.000.000	100%	Rp 1.635.000.000	Bidang TIK	Kab.Gowa

					memanfaatkan domain dan sub domain																
			2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100%	100%	Rp 1.635.000.000	2 koneksi	Rp 1.635.000.000	2 koneksi	Rp 1.635.000.000	2 koneksi	Rp 1.635.000.000	2 koneksi	Rp 1.635.000.000	2 koneksi	Rp 1.635.000.000	2 koneksi	Bidang TIK	Kab.Gbowa
Meningkatkan Tata laksana komunikasi dan Informasi	Meningkatnya tata laksana komunikasi dan Informasi	Persentase ketersediaan informasi meningkat	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase OPD yg terhubung dengan internet yg disediakan oleh kominfo	100%	100%	Rp 588.033.200	100%	Rp 588.033.200	100%	Rp 588.033.200	100%	Rp 588.033.200	100%	Rp 588.033.200	100%	Rp 588.033.200	100%	Bidang TIK	Kab .Gowa
			2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	100%	100@	Rp 375.846.200	1 dok	Rp 375.846.200	1 dok	Rp 375.846.200	1 dok	Rp 375.846.200	1 dok	Rp 375.846.200	3 jenis	Rp 375.846.200		Bidang TIK	Kab. Gowa



				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi intra Pemerintah Daerah	100%	1 Dokumen	Rp 416.196.450	1 Dokumen	Rp 416.196.450	1 Dokumen	Rp 416.196.450	1 Dokumen	Rp 416.196.450	1 Dokumen	Rp 416.196.450	1 Dokumen	Rp 416.196.450	Bidang TIK	Kab. Gowa
		2.16.03.2.02.10		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	100%	1 dok	Rp 100.310.000	1 dok	Rp 100.310.000	1 dok	Rp 100.310.000	1 dok	Rp 100.310.000	1 dok	Rp 100.310.000	1 dok	Rp 100.310.000	Bidang TIK	Kab. Gowa
		2.16.03.2.02.07		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang	100%	3 unit	Rp 41.877.000	3 unit	Rp 41.877.000	3 unit	Rp 41.877.000	3 unit	Rp 41.877.000	3 unit	Rp 41.877.000	3 unit	Rp 41.877.000	Bidang TIK	Kab. Gowa

					Dikembangkan															
			2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%	1 dok	Rp 70.000.000	1 dok	Rp 70.000.000	1 dok	Rp 70.000.000	1 dok	Rp 70.000.000	1 dok	Rp 70.000.000	1 dok	Rp 70.000.000	Bidang TIK	Kab. Gowa
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>																
Meningkatkan koordinasi dan penyediaan data statistik bersifat sektoral	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik	Persentase ketersediaan Data/Informasi Statistik Daerah	2.20.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Bidang Statistik	Kab.Gowa

					dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah															
			2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komptilasi statistik sektoral yg mendapat rekomendasi dari BPS	100%	100%	Rp 27.592.000	100%	Rp 27.592.000	100%	Rp 27.592.000	100%	Rp 27.592.000	100%	Rp 27.592.000	100%	Rp 27.592.000	Bidang Statistik	Kab.Gowa
			2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	100%	63 orang	Rp 12.592.000	63 orang	Rp 12.592.000	63 orang	Rp 12.592.000	63 orang	Rp 12.592.000	63 orang	Rp 12.592.000	63 orang	Rp 12.592.000	Bidang Statistik	Kab.Gowa
			2.20.02.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, Analisis dan desiminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,	100%	1 dok	Rp 15.000.000	1 dok	Rp 15.000.000	1 dok	Rp 15.000.000	1 dok	Rp 15.000.000	1 dok	Rp 15.000.000	1 dok	Rp 15.000.000	Bidang Statistik	Kab.Gowa



			2.21.02.2.01.	Penetapan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	-	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 25.000.000	Bidang Persandian	
			2.21.02.2.01.	Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan & Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	100%	Rp 114.590.000	100%	Rp 120.590.000	100%	Rp 14.590.000	100%	Rp 14.590.000	100%	Rp 14.590.000	100%	Rp 14.590.000	Bidang Persandian	

			2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100%	1 lap	Rp 5.900.000	1 lap	Rp 5.900.000	1 lap	Rp 5.900.000	1 lap	Rp 5.900.000	1 lap	Rp 5.900.000	1 lap	Rp 5.900.000	Bidang Persandian	
			2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pola hubungan komunikasi Sandi antar perangkat Daerah	100%	100%	Rp 8.900.000	100%	Rp 8.900.000	100%	Rp 8.900.000	100%	Rp 8.900.000	100%	Rp 8.900.000	100%	Rp 8.900.000	Bidang Persandian	
			2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	100%	63 perangkat	Rp 8.900.000	63 perangkat	Rp 8.900.000	63 perangkat	Rp 8.900.000	63 perangkat	Rp 8.900.000	63 perangkat	Rp 8.900.000	63 perangkat	Rp 8.900.000	Bidang Persandian	



## **BAB VII**

# **INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN GOWA TAHUN 2017-2021**

Untuk Mencapai Tujuan, Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gowa, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Menetapkan Beberapa Indikator Kinerja Yang Akan Dicapai Dalam Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun Sebagai Penjabaran Dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Yang Tertuang Dalam RPJMD. Target Pencapaian Kinerja Sesuai Indikator Yang Telah Ditetapkan, Merupakan Suatu Bentuk Kontrak Kerja OPD Dengan Pemerintah. OPD Akan Mempertanggungjawabkan Kepada Pemerintah Setiap Tahun Melalui Dokumen LAKIP Tahunan Dan LAKIP Lima Tahunan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah.

### **7.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2021- 2026**

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Gowa Yang Menunjukkan Secara Langsung Keluaran (Output) Hasil Kinerja Yang Akan Dicapai Selama 5 (Lima) Tahun Mendatang Sebagai Komitmen Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Gowa Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 Seperti Tampilan Pada Tabel 6.1 Berikut.



**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Tahun 2021 - 2026**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2021	Target Capaian				Capaian Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026
				2022	2023	2024	2025	
1.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	30%	60%	90%	100%	100%	100%
6.	Nilai SAKIP	Kategori	B	B	BB	BB	BB	BB
7.	Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	B	B	B	B	A	A





## **BAB VIII PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dan pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Rencana Strategis Strategi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, Tahun 2021-2026, diharapkan mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana kerja dan anggaran (RKA) dan di lain pihak Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Strategi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, yaitu penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya.

Dokumen Renstra Strategi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai factor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal, Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Strategi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan Strategi Strategi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026



**Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Gowa**

---

Akhirnya semoga perencanaan strategis yang telah disusun dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Gowa, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian secara proporsional.

Sungguminasa, 24 September 2021

